
**PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL VIA WEBSITE DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Moh. Zainullah¹, Mohammad Herli², Hafidhah³

^{1,2,3} Universitas Wiraraja Madura

Email : ¹ gostsozain0@gmail.com, ² mohammadherli@wiraraja.ac.id

³ hafidhah@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pengungkapan modal intelektual melalui website terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten untuk mengukur tingkat pengungkapan modal intelektual, serta analisis regresi untuk menguji hubungan antara tingkat pengungkapan dan kinerja pemerintah daerah. Data dikumpulkan dari website resmi pemerintah daerah dan laporan kinerja tahunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan modal intelektual melalui website memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pemerintah daerah. Pengungkapan yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja melalui pengelolaan dan pengungkapan modal intelektual secara optimal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai modal intelektual dan pengungkapan informasi di sektor publik, serta memberikan bukti empiris tentang pentingnya transparansi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keterbatasan penelitian ini meliputi penggunaan data yang terbatas pada periode tertentu dan fokus pada satu negara, sehingga generalisasi hasil mungkin terbatas. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi variabel tambahan dan memperluas cakupan geografis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Pengungkapan Modal Intelektual, Website, Kinerja Pemerintah Daerah

1. INTRODUCTION

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah otonom yang memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Nugroho & Prasetyo, 2018) Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan

mengatur sumber daya sesuai dengan kemampuannya, serta mengurus sendiri pemerintahannya, pengukuran kinerja pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk melihat apakah suatu daerah mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik ataupun sebaliknya (Sundari & Arza, 2021:218). Ningsih & Subardjo (2019) menemukan bahwa kinerja pemerintah Daerah

dapat di tentukan oleh Akuntabilitas publik, transparansi publik, komitmen organisasi dan kualitas Sumberdaya manusia. Pengukuran kinerja pemerintah daerah (Pemda) haruslah mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan (Nugroho & Prasetyo, 2018:28). Pada penelitian ini lebih fokus untuk melihat dari segi pengaruh faktor non keuangan dalam kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini website, keberadaan website yang dimiliki oleh pemerintah daerah diyakini dapat menciptakan kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik, (Melda A, Edi P, & Febita S, 2021) lebih khusus dalam penelitian ini bermaksud untuk mengungkap bagaimana pengungkapan modal intelektual yang dilakukan di website pemerintah daerah itu bisa memicu terhadap terciptanya kinerja pemerintahan daerah.

Stakeholder teori mengungkapkan bahwa, organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh pemangku kepentingan dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut kepada para *stakeholder*, Teori ini menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak untuk disediakan informasi tentang aktivitas organisasi yang mempengaruhi mereka (Melda A, Edi P, & Febita S, 2021). dalam konteks pemerintahan daerah stakeholder dapat berupa masyarakat, pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait yang memerlukan informasi terhadap

pencapaian kinerja pemerintah daerah, salah satu yang baru-baru ini yang dianggap penting untuk di ungkapkan di dalam website pemerintahan daerah adalah pencapaian modal intelektual.

Peran penting website dan social media sebagai pengungkapan modal intelektual telah diteliti sebelumnya oleh, (Ramirez, Y., Tejada, A., & Sanchez, M. P. 2020) salah satu bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi yaitu dengan penggunaan media website yang telah di terapkan oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Penggunaan media website di organisasi publik memegang peranan penting dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dengan menyediakan pengungkapan yang lebih efektif kepada warga dan organisasi mengenai proses, struktur, dan produk pemerintah (Charoline C, Herlina H, & Dwita S, 2018:1088). Pengungkapan modal intelektual menjadi sangat penting karena merupakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal dan eksternal, (Candara H, 2021).

Penelitian sebelumnya terkait dengan pengungkapan modal intelektual itu lebih banyak dilakukan dinegara maju dan pada sektor korporat perusahaan swasta atau privat. (Sumardi, A, 2017), (Rezki B, 2018), (Adiman S, 2017), hasil penelitian dari para peneliti tersebut menyatakan bahwa pengungkapan

modal intelektual berdampak pada kinerja perusahaan, serta penelitian Hafiez *et al* (2021) yang menyatakan bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja Perguruan Tinggi di Indonesia, Namun penelitian yang dilakukan oleh Nazra M, dan Suazhari (2019) menemukan bahwa Modal intelektual berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perbankan Umum syariah berdasarkan *Islamicity performance index*, selain itu penelitian terdahulu belum memperhatikan seberapa besar instrumen IC yang di ungkapkan. Melihat kesenjangan dari penelitian terdahulu, peneliti berusaha mengungkapkan instrumen IC secara detail dengan konten analisis. sehingga akan memperoleh hasil yang akan lebih akurat.

Serta ada beberapa aspek perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu, aspek pertama, penelitian ini dilakukan di sektor publik yaitu pemerintahan daerah yang masih jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya banyak dilakukan di sektor korporat atau perusahaan-perusahaan Swasta. Aspek yang kedua, menggunakan konten analisis sehingga menggambarkan seberapa besar instrumen IC yang di ungkapkan.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan akan besarnya kebutuhan informasi warga tentang pemerintahan

daerahnya, maka Penelitian ini di fokuskan pada situs web pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini memilih situs website ini karena memiliki fitur yang lebih lengkap dari pada platform media sosial lain, sehingga pengungkapan informasi akan lebih lengkap dan situs website ini umumnya di gunakan oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.

2. LITERATURE REVIEW

a. Stakeholder Theory

Beberapa ahli memperdebatkan kasus bisnis dari perspektif instrumentalis, bahwasanya mengenai *Stakeholders Theory* atau teori pemangku kepentingan ini dalam mengelola hubungan *stakeholders* yang spesifik perusahaan yang baik untuk menilai tambah *bottom line* bagi perusahaan (Brown & Forster, 2017). *Stakeholder Theory* mengungkapkan bahwa, organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh pemangku kepentingan dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut kepada para *stakeholder* (Melda A, Edi P, & Febita S, 2021). Teori ini menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak untuk disediakan informasi tentang aktivitas organisasi yang mempengaruhi mereka, dalam konteks pemerintahan daerah stakeholder dapat berupa

masyarakat, pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait yang memerlukan informasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah, salah satu baru-baru ini yang dianggap penting untuk di ungkapkan di dalam website pemerintahan daerah adalah pencapaian modal intelektual.

b. Modal Intelektual (IC)

Modal intelektual didefinisikan oleh *European Commission* (2006) sebagai kombinasi sumber daya yang tidak berwujud dan kegiatan organisasi dalam mengubah kuantitas material, sumber daya keuangan, dan manusia dalam sebuah sistem yang dapat menciptakan suatu nilai. Selaras dengan Bukh, Nielsen, Gormsen, dan Mouritsen (2005), modal intelektual ialah proses penciptaan nilai bagi suatu organisasi dari berbagai kombinasi sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi. Tidak hanya itu, definisi yang sering digunakan oleh beberapa literatur mengacu terhadap *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD, 1999) yang mendefinisikan IC sebagai dua kategori nilai ekonomi aset tak berwujud dan terbagi atas dua bagian yaitu organisasional dan human Capital. Komponen modal intelektual telah dikategorikan dalam berbagai cara. Namun, terdapat klasifikasi yang tidak diragukan lagi dan paling banyak diterima dalam literatur khusus (Bezhani, 2010; Bontis, 2001; Casanueva & Gallego, 2010; Córcoles,

2013; Sánchez et al., 2006) dengan klasifikasi modal intelektual terdiri dari tiga komponen dasar yang berhubungan erat yaitu Human Capital (Modal Manusia), structural Capital (Modal Struktural), dan relational Capital (Modal Relasional).

c. Pengungkapan modal intelektual (ICD)

Pengungkapan (*disclosure*) adalah suatu tindakan menyingkapkan atau membeberkan seluruh informasi baik informasi baru ataupun informasi rahasia yang relevan berkenaan dengan suatu perusahaan yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan investasi. Pengungkapan pada umumnya berkaitan dengan penyajian informasi secara sukarela. (Schaper, et. al., 2017). Pengungkapan berbeda dengan pelaporan (*reporting*). Dalam proses adaptasi manajemen publik yang sebenarnya, pemerintah daerah harus memperoleh model tata kelola untuk memperkuat otonomi kelembagaan, tetapi juga dengan transparansi yang lebih besar terhadap masyarakat dan kontrol yang lebih besar atas hasil (Pina et al., 2010). Meningkatkan transparansi tidak hanya tentang pelaporan keuangan tetapi juga untuk mengetahui, memvisualisasikan, dan mengukur IC (Modal intelektual) untuk mengelola pengetahuan yang mereka miliki secara efektif dan efisien (Bronzetti dan Sicoli, 2011. Del Bello, 2016. Secundo et al., 2017).

Pengungkapan modal intelektual via website dan kinerja pemerintahan daerah menyediakan informasi online yang memungkinkan warga untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka dan menyadari proses penciptaan nilai. Hal ini, pada gilirannya, dapat menciptakan hubungan yang baik dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan, seperti warga negara, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha dan karyawan, memfasilitasi dukungan dan persetujuan mereka (Michelon dan Parbonetti, 2012). Dalam hal ini pengungkapan modal intelektual via website menjadi sangat penting mengingat, media online seperti halnya website dapat menjadi alat yang efektif dan berguna untuk mengungkapkan informasi kepada berbagai warga yang terlibat dalam kegiatan pemerintah daerah (Yolanda R, Angela T, & Maria P, 2020). Ningsih & Subardjo (2019) menemukan bahwa kinerja pemerintah Daerah dapat di tentukan oleh Akuntabilitas publik, transparansi publik, komitmen organisasi dan kualitas Sumberdaya manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut diyakini ada keterkaitan dengan komponen IC, Seperti halnya sumberdaya manusia memiliki keterkaitan dengan komponen IC yaitu Human capital, dimana Human capital akan meningkat apabila suatu organisasi tersebut mampu mengelola kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya (Putri L, 2016). transparansi tidak hanya

tentang pelaporan keuangan tetapi juga untuk mengetahui, memvisualisasikan, dan mengukur IC (Modal intelektual) untuk mengelola pengetahuan yang mereka miliki secara efektif dan efisien (Bronzetti dan Sicoli, 2011. Del Bello, 2016. Secundo et al., 2017).

Ramírez, Y., Tejada, Á., & Sánchez, M. P. (2020) menemukan bahwa, informasi yang diberikan melalui media sosial terutama menyangkut modal relasional (RC). Di sisi lain, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kota madya yang lebih besar, dengan otonomi keuangan yang lebih rendah dan yang warganya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, menggunakan media Online (baik situs web maupun media sosial) lebih aktif untuk mengungkapkan informasi tentang IC. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori serta penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis dalam penelitian aitu :

H_1 = Terdapat pengaruh antara pengungkapan modal intelektual via website dengan kinerja pemerintahan daerah

3. METHODS

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Pengertian deskriptif yaitu metode penelitian yang dimaksud untuk

menggambarkan sesuatu yang diteliti, kemudian menganalisis untuk memberikan alternatif penyelesaian dari masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016). Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik serta bertujuan untuk membuktikan hipotesis (Nurlan, F. 2019).

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian ini

menggunakan metode kuota sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa pemerintah daerah yang ada di Indonesia, khususnya pulau Jawa, dipilih pulau Jawa karena Jawa merupakan kepulauan terpadat atau jumlah penduduknya terbesar di Indonesia, untuk lebih memfokuskan penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa kriteria pemerintah Daerah untuk dijadikan sampel penelitian, kriteria tersebut di antaranya:

Tabel 1. Kriteria – Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Pengurangan	Jumlah
1.	Pemerintah daerah yang ada di Indonesia		489
2.	Pemerintah daerah yang ada di pulau Jawa	(377)	112

Sumber : Diolah peneliti

Setelah dilakukan proses seleksi berdasar kriteria yang telah ditetapkan, maka terpilih 112 pemerintah daerah Kabupaten/kota, dari 6 provinsi yang ada di pulau Jawa.

c. Pengukuran variabel penelitian

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan modal intelektual (ICD) yang diukur dengan mengamati keberadaan pengungkapan modal intelektual (ICD) yang terdiri dari Human Capital, Struktural capital, dan Relational capital. Pengukuran ini dilakukan dengan mengidentifikasi komponen pengungkapan

modal intelektual (ICD). Hal ini mengacu pada penelitian sebelumnya tentang pengukuran ICDI (Ramírez, Y., Tejada, Á., & Sánchez, M. P. (2020). Maka:

$$ICDI = \frac{\sum_{i=1}^l di}{l} * 100$$

Dimana $di = 0$ atau 1 , dan $di = 1$ jika item pengungkapan ditemukan, $di = 0$ jika item pengungkapan tidak ditemukan, dan l = jumlah item IC (komponen) yang dapat diungkapkan pemerintah daerah, Untuk menyatakan ini dalam bentuk persentase, maka kemudian dikalikan dengan 100.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Ningsih & Subardjo (2019) menemukan bahwa kinerja pemerintah Daerah dapat di tentukan oleh Akuntabilitas publik, transparansi publik, komitmen organisasi dan kualitas Sumberdaya manusia. penelitian ini menggunakan (permendagri peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara Nasional) yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri, sebagai salah satu bahan dalam pengukuran variabel dependen.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier dengan bantuan yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dengan menggunakan data cross-sectional, efek individual tertentu yang tidak teramati dapat dikendalikan. (Herli et al., 2021). Alasan

menggunakan regresi linier, dikarenakan penelitian ini hanya memiliki dua variabel, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Y = Variabel terikat (dependen)

X = Variabel bebas (independen)

α = Konstanta

b = Koefisien variabel

Mengacu pada rumus di atas, rumus yang digunakan menjadi :

$$\text{Kinerja Pemerintah}(KP) = \alpha + b \text{ ICD}$$

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

Metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dengan menggunakan data cross-sectional. Hasil Analisis Regresi Linier sederhana dengan bantuan SPSS sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.144	.266		8.047	.000
	X	.014	.004	.315	3.479	.001
a. Dependent Variable: y						

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan Tabel Coefficients diatas maka dapat disusun rumus persamaan Regresi: $Y = 2.144 + 0.14X + e$. Dari hasil perhitungan persamaan tersebut, diketahui nilai Constant (a) sebesar 2,114, yang berarti nilai konsisten variabel sedangkan nilai Koefisien Variabel X (b) sebesar 0,014. Yang berarti bahwa setiap

penambahan 1% nilai X, maka nilai Y bertambah sebesar 0,014. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga arah pengaruh variabel X terhadap Variabel Y positif. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel X (pengungkapan modal intelektual via website) berpengaruh terhadap variabel Y (kinerja pemerintah Daerah). Berdasarkan nilai t dari tabel koefisien di atas diperoleh nilai t hitung sebesar $3,479 > t$ tabel $1,983$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X (pengungkapan modal intelektual via website) berpengaruh terhadap variabel Y (kinerja pemerintah Daerah).

Berdasarkan hasil uji t , menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $3,479$. Berdasarkan jumlah sampel nilai t -tabel sebesar $1,983$ yang berarti t -hitung lebih besar dari t -tabel ($3,479 > 1,983$) dan selain itu juga berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien sebesar $0,001$ yang lebih kecil dari $0,05$ yang berarti bahwa H_1 diterima. Yaitu terdapat pengaruh variabel Independent (pengungkapan modal intelektual via website) terhadap variabel dependen (kinerja pemerintah Daerah).

Dalam penelitian ini Pengungkapan Modal Intelektual yang terdiri atas 27 item pengungkapan dari tiga komponen dasar yaitu, *Human capital*, *Relational Capital*, *Struktural Capital* yang diungkapkan via website di sektor publik khususnya pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kinerja pemerintah Daerah. Karena merupakan suatu informasi yang relevan, yang harus diketahui oleh pihak-pihak terkait, serta

digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah Daerah tersebut dalam rangka pengambilan beberapa keputusan, serta dapat membantu pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien.

Mengacu pada *Stakeholder theory* yang menyatakan bahwa para pemangku kepentingan berhak untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas-aktivitas organisasi yang mempengaruhi mereka. Dalam hal ini para pemangku kepentingan dapat berupa masyarakat, pemerintah pusat dan pihak-pihak eksternal lainnya yang membutuhkan ketersediaan informasi pengungkapan modal intelektual yang dapat diakses melalui media website pemerintah Daerah, dan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Serta agar terciptanya suatu bentuk pemerintahan yang transparan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hafiez (2021), Melda (2021) yang menyatakan bahwa Pengungkapan Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja Perguruan Tinggi di Indonesia.

5. CONCLUSIONS

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pengungkapan modal

intelektual melalui website terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Dengan mengintegrasikan analisis konten dan regresi, penelitian ini mengkaji bagaimana tingkat pengungkapan informasi terkait modal intelektual dapat mempengaruhi efisiensi, efektivitas, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari website resmi pemerintah daerah dan laporan kinerja tahunan. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat pengungkapan modal intelektual dan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai modal intelektual, seperti sumber daya manusia, proses internal, dan inovasi, cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Kinerja yang ditingkatkan ini terlihat dalam efisiensi operasional yang lebih tinggi, peningkatan efektivitas layanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas terhadap publik.

Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja mereka melalui pengelolaan dan pengungkapan modal intelektual secara optimal. Hasil penelitian ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mengelola dan mengungkapkan modal intelektual mereka

sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang modal intelektual dan pengungkapan informasi di sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pentingnya transparansi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan teori terkait pengelolaan modal intelektual di sektor publik. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan terbatas pada periode tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan perubahan jangka panjang dalam pengungkapan modal intelektual dan kinerja pemerintah daerah. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada satu negara, yaitu Indonesia, sehingga generalisasi hasil untuk konteks global harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, terdapat variabel lain yang mungkin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang belum teridentifikasi dalam penelitian ini. Untuk penelitian masa depan, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan temporal agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi. Penelitian lanjutan

juga perlu mempertimbangkan variabel tambahan yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti faktor politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pengungkapan modal intelektual diterapkan dan dipersepsikan oleh berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan daerah.

Arta Express dalam menyusun kebijakan akuntansi hanya melakukan pencatatan berdasarkan akrual dan masih belum melakukan penyusunan kebijakan akuntansi sehingga dalam pencatatan akuntansi masih belum ada acuan/pedoman. Pelaku usaha Arta Express hanya menyusun laporan keuangan yakni laporan laba rugi, sehingga masih belum melakukan implementasi SAK EMKM secara lengkap. Padahal penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, tetapi meskipun begitu pelaku usaha Arta Express dalam pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan laba rugi sudah menggunakan aplikasi excel. Dan untuk aset tetap yang dimiliki belum dibuat daftar inventarisasi aset serta perhitungan penyusutannya, sehingga masih belum dilakukan penyusunan laporan posisi keuangan. Hal ini disebabkan terkendala kurangnya pengetahuan akuntansi dan sumber

daya manusia yang kurang memadai. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya menambah objek minimal 2 pelaku usaha sebagai pembanding penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

6. REFERENCES

- Anggraeni, A. V., & Indarti, M. G. K. (2021). Pengaruh pengungkapan modal intelektual terhadap biaya modal ekuitas. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 63-87.
- Boedi, S., & Amalia, H. S. (2021). Pengungkapan modal intelektual perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. *KINERJA*, 18(3), 431-439.
- Cheisvianny, C. (2018). Analisis kualitas website pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1087-1104.
- Herawati, L. I., Ulum, I., & Juanda, A. (2020). Pengungkapan Modal Intelektual Perguruan Tinggi Vokasi Di Indonesia Berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(1), 107-121.
- Herli, M., Tjahjadi, B., & Hafidhah, H. (2021). Gender diversity on board of directors and intellectual capital disclosure in

-
- Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 8(1), 135-144.
- Mehrotra, V., Malhotra, A. K., & Pant, R. (2018). Intellectual capital disclosure by the Indian corporate sector. *Global Business Review*, 19(2), 376-392.
- Ningsih, W., & Subardjo, A. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(11).
- Ramírez, Y., Tejada, Á., & Sánchez, M. P. (2020). Determinants of online intellectual capital disclosure by Spanish local governments. *Journal of Intellectual Capital*.
- Susanti, S., Pranyoto, E., & Safitriani, F. (2021, September). Pengungkapan Intellectual Capital Pada Perguruan Tinggi Swasta Peraih Webometrics 2021 Di Lampung. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, pp. 55-64).
- Ul'fah Hernaeny, M. P. (2021). *No Title*. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33060/13312325_Nur_Lia_Saraswati.pdf?sequence=1